

# DINAMIKA PENDIDIKAN ISLAM DI INDONESIA (KAJIAN HISTORIS DARI TRADISIONAL MENUJU KONTEMPORER)

Mohammad Asrori

Fakultas Tarbiyah Universitas Islam Negeri Malang  
Jalan Gajayana 50 Malang 65114 Telp. 0341-551354, Faks. 0341-572533.

## Abstract

*Observing Islamic education in Indonesia, historically it was started from a religious boarding school which was called "Pesantren". It received an outstanding welcome from society, although it had not been called yet as a legal and formal education in Majapahit era. However, in Mataram era, education in pesantren had started crawling step by step to the direction ep by step to the form of formalization. Moreover, at the same time, many social-religious organizations, education, discourses were established, such as Muhammadiyah, Nahdhatul Ulama, al-Irsyad, Jamyyatul Washliyah, and etc. Our Islamic education recently starts to develop rapidly of which developmental pattern is more modern and contemporary. Besides, there are some Islamic schools from Islamic high school to Islamic State University (UIN) or starts from Islamic University of Indonesia (UII) to other kinds of Islamic Private Universities such as Muhammadiyah University of Malang (UMM), Darul Ulum University of Jombang (UNDAR), and etc. The best solution of our Islamic education today can be seen from many opinions such as As-Saibany, Azyumardi Azra, A.Malik Fajar, M. Tholhah Hasan.*

*Key words: historically, thought, pesantren (a religious boarding school), islamic education*

## Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu investasi yang sangat berharga bagi masyarakat. Pendidikan yang dapat menjanjikan terhadap masyarakat berarti pendidikan yang dapat mengantarkan perubahan yang sangat berarti dalam masyarakat tersebut. Selanjutnya, perubahan model pendidikan yang beraneka-ragam dalam mewujudkan urgensinya tidak dapat dilepas-pisahkan dengan tuntutan situasi dan kondisi masyarakat yang dimaksud (*Thibaqahu Li Muqtadhal Maqami*) (Al-Akhdhari, tt.: 11).

Prosesi perkembangan pendidikan di tengah masyarakat ternyata seringkali terjadi kehilangan *ruh al-Tarbiyah*-nya, artinya, di sini ada keterkaitan dengan pengembangan *Tarbiyah Islamiyah* (Al-Hijazy, 2001: 77). *Tarbiyah Islamiyah* dapat bergairah lagi dengan *ruh al-Tarbiyah*-nya, dengan memahami konsep *Tarbiyah Islamiyah* secara *integrative* dan *komprehenship* terdapat dua hal yang sangat urgen. *Pertama*, *Tarbiyah* yang berkaitan dengan *murabbi*, yakni sebuah *Tarbiyah* yang dilakukan *murabbi* terhadap ilmu-nya, agar ilmu tersebut dapat sempurna dan menyatu dalam dirinya. *Kedua*, *Tarbiyah* yang berkaitan dengan orang lain, yakni, kerja *Tarbiyah* yang dilakukan *murabbi* dalam mendidik manusia dengan ilmu yang dimilikinya. Akhirnya, berbagai usaha semangat untuk mengedepankan pendidikan terhadap masyarakat dibanding lainnya tidak jarang terabaikan. Problematika internal pendidikan masyarakat yang sangat komprehenship perlu mendapatkan perhatian dan solusi terbaik, lebih-lebih masyarakat yang belum dapat menikmati layaknya pendidikan formal (Al-Hijazy, 2001: 85).

Bertolak dari asumsi dasar di atas, setidaknya dapat melahirkan hasil eksplorasi intelektual dikalangan kaum pemikir, ulama dan cendekiawan terhadap dinamika pendidikan Islam pada masa klasik dan kontemporer di seputar kawasan Indonesia dewasa ini.

### **Kegelisahan Intelektual terhadap Pendidikan Islam**

Berangkat dari problematika pendidikan secara umum di Indonesia dewasa ini dapat dijelaskan oleh Yahya muhaimin sebagai berikut: 1) masih rendahnya pemerataan pendidikan; 2) masih rendahnya mutu dan relevansi pendidikan; 3) masih lemahnya manajemen pendidikan (Muhaimin: 2001: 29). Lebih jelas pula, A. Malik Fajar menandakan sebagai berikut: a) stigma keterpurukan bangsa; b) eskalasi konflik; c) krisis moral dan etika; d) pudarnya identitas bangsa (Fajar, 2004: 7). Namun demikian, ia lebih menekankan kondisi riil bangsa ketika kita menginginkan berbagai rancangan dalam mewujudkan pengembangan pendidikan Islam untuk upaya merespon tuntutan global di negeri ini.

Dari faktor lain, secara internal dalam pendidikan sendiri terdapat pula berbagai problem di tengah realitas masyarakat, di antaranya adalah (Sunyoto, 2006: 2).

*Pertama*, Problem pendidikan sejak sistem kolonial Belanda masuk ke-Indonesia secara tidak sadar membangun “mitos” (harapan kosong tidak tentu arah) pada kesuksesan. Pemahaman yang menyesatkan banyak kalangan bahwa proses untuk menuju “perubahan dan kemajuan” yang berujung pada status social, harus lewat pendidikan secara formal. Padahal realitas logika di atas, sebagaimana berbenturan dengan realitas pengangguran yang semakin “menyampah”. Janji dan jaminan bahwa lembaga pendidikan menghasilkan orang sukses, praktis hanya diperuntukkan pada kelompok mereka yang berduit dan para bangsawan dalam lingkaran elit kolusi dan nepotisme. Sekolah sudah gagal membentuk manusia yang berdikari dan berkarakter serta berkepribadian luhur dan tawakkal.

*Kedua*, Problem pendidikan secara internal sebagai komoditas bisnis memenuhi berbagai tuntutan pragmatis, mengesampingkan pembentukan karakter perjuangan dan keberpihakan terhadap problem social. Paradigma pendidikan digiring untuk memenuhi kuota industri dan pasar.

*Ketiga*, Problem pendidikan sebagai instrumen (*apparatus*) kekuasaan negara, sehingga tidak mempunyai independensi dalam menentukan arah dalam mengawal proses perubahan social.

*Keempat*, Problem pendidikan sebagai proses perpanjangan tangan dari sistem kapitalisasi dunia Barat. Konsekwensinya sistem dan materi yang diajarkan hanyalah mengarahkan pada proses sekulerisme. Akibatnya agama dan sistem nilai spritual sudah tidak layak diajarkan, kalau perlu dianggap tidak rasional, karena tidak mampu memenuhi kebutuhan industri dan pasar.

*Kelima*, Kemunculan model pendidikan non formal mulai dijadikan ajang bisnis komersil dengan biaya tinggi mengumbar janji, sehingga kehadirannya hanya sebagai candu untuk menampung alumni frustrasi. Berangkat dari signifikansi berbagai problematika di atas, perlu kiranya penulis mendiskripsikan “Dinamika Pendidikan Islam di Indonesia (dari Tradisional Menuju Kontemporer).

## Subtansi Kajian

### 1. Pesantren; Akar Historis dan Fakta

Memahami realitas “pesantren” secara tidak langsung kita harus menengok latar belakang historisnya. Ada pandangan yang menarik bahwa “pesantren” telah ada sebelum masa Islam. Pernyataan tersebut dilontarkan Azyumardi Azra sebagai berikut;

“Sebagai lembaga pendidikan *indigenous*, pesantren memiliki akar sosio-historis yang sangat kuat, sehingga membuatnya mampu menduduki posisi yang relatif sentral dalam dunia keilmuan masyarakatnya, dan sekaligus bertahan di tengah berbagai gelombang perubahan. Kalau kita menerima spekulasi bahwa “pesantren” telah ada sebelum masa Islam, maka sangat boleh jadi ia merupakan satu-satunya lembaga pendidikan dan keilmuan di luar istana. Dan jika ini benar, berarti pesantren merupakan semacam lembaga “*counter culture*” (budaya tandingan) terhadap budaya keilmuan yang dimonopoli kalangan istana dan elit Brahmana” (Azra, 1998: 87).

Pernyataan di atas, dapat pula dianggap benar dan relevan bilamana kita melihatnya dalam konteks masyarakat pribumi (tanah Jawa). Karena masyarakat Jawa secara riil pada saat itu yang ada hanyalah agama mayoritas Syiwa-Budha.

Dari sisi lain adalah betapa sulitnya proses islamisasi di tanah Jawa itu penjelasan ini juga ditegaskan Agus Sunyoto sebagai berikut:

“Catatan historiografi Jawa ini menunjukkan betapa sulitnya proses islamisasi di Jawa. Namun seiring kehadiran penduduk muslim Cina dan Campa pada abad ke-15, gelombang islamisasi sangat cepat. Salah satu proses islamisasi adalah melalui asimilasi budaya dan pengambil-alihan lembaga pendidikan Syiwa-Budha yang disebut Asrama dan Dukuh menjadi pondok pesantren. Hal itu memungkinkan terjadi, karena nilai-nilai yang dianut di lembaga pendidikan Syiwa-Budha memiliki kemiripan dengan ajaran Islam” (Sunyoto, 2006: 2).

Sebagai penegasan kembali “Asrama dan Dukuh” milik lembaga pendidikan Syiwa- budha yang memiliki “kemiripan” dengan ajaran Islam itu ternyata sangat relevan dengan “kemungkinan keunikan spekulatif” Azra bahwa, “pesantren” telah ada sejak sebelum Islam dalam konteks masya-

rakat Jawa sebagai akibat pengambil-alihan lembaga pendidikan Syiwa-Budha yang dinamakan Asrama dan Dukuh menjadi “pondok pesantren”. Kemiripan nilai-nilai Syiwa-Budha dengan ajaran Islam dapat pula diringkaskan dalam 4 hal. *Pertama*, *Ghurubhakti* adalah berisi tata tertip, sikap hormat dan sujud bakti yang wajib dilakukan siswa terhadap guru ruhani-nya. *Kedua*, *Yamabrata* adalah aturan yang mengatur pengendalian diri, yaitu; memiliki prinsip hidup yang disebut *chimsa* (*tidak menyakiti, tidak menyiksa, tidak membunuh*), menjahui sifat *kroda* (marah), *moha* (gelap pikiran), *mana* (angkara murka), *mada* (takabbur), *matsarya* (iri, dengki). *Ketiga*, *Niyabarata* adalah memiliki tingkat yang lebih jauh, sebagai contoh *Niyabrata* tidak saja melarang *wiku* marah tetapi sudah pada tingkat *wiku* tidak marah (*Akroda*). *Keempat*, *Awaharaghawa* adalah bagian *Niyabrata* yang bermakna tidak berlebihan, memahami dalam konsep jawa (*ora ngoyo lan ora ngogso*), tidak berlebihan (tidak makan jika tidak lapar, makanpun tidak boleh kenyang), memakan makan suci, membatasi makanan daging (*boghasarwangsa*), bersyukur makanan yang dimakan (*santosa*), tidak rakus (*wuhksah*), tidak malas menjalankan kewajiban (*apramada*) dan lain-lain (Sunyoto, 2006: 47).

Proses perkembangan selanjutnya, pada akhir era Majapahit bahwa pesantren-pesantren telah bertumbuh kembang dan mendapat pengakuan di tengah realitas masyarakat. Setidaknya ada 3 pokok fungsi pesantren: 1) Transmisi ilmu pengetahuan Islam (*transmission of Islamic knowledge*); 2) Pemeliharaan tradisi Islam (*maintenance of Islamic tradition*); 3) Pembinaan calon-calon ulama (*reproduction of ulama*); (Azra, 1998: 89). Namun, fungsi pesantren ada dua hal. *Pertama*, sebagai lembaga pendidikan, pesantren menyelenggarakan pendidikan formal (madrasah, sekolah umum, dan perguruan tinggi), dan pendidikan non formal yang secara khusus mengajarkan agama yang sangat kuat dipengaruhi oleh pikiran-pikiran oleh ulama *fikih, hadis, tafsir, tauhid, dan tasawuf* yang hidup antara abad ke-7-13 M. Kitab-kitab yang dipelajarinya meliputi *tauhid, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, tasawuf, bahasa Arab (nahwu, saraf, balaghoh, dan tajwid), mantic, dan akhlak*. *Kedua*, sebagai lembaga sosial, pesantren menampung anak dari segala lapisan masyarakat muslim, tanpa membeda-bedakan tingkat social ekonomi orangtuanya. Biaya hidup di pesantren realitif lebih murah daripada belajar di luar pesantren (Mastuhu, 1994: 59-60).

Adalah menjadi kenyataan bahwa "pesantren" menjadi sorotan publik terutama para tokoh masyarakat, yang senantiasa menginginkan anak-anaknya mempunyai kepedulian belajar ke pesantren dan mengalami proses belajar maksimal, sehingga pada akhirnya mereka mendapatkan kesuksesan di masyarakat. Fenomena ini dapat digambarkan sebagaimana para putra raja, bupati, nayakapraja, saudagar, pujangga, petani, nelayan, dan perajin. Berangkat dari pesantren-pesantren inilah ternyata mampu melahirkan tokoh-tokoh termasyhur di tengah masyarakat sebagaimana halnya, R. Patah, sultan Trenggono, Sultan Adiwijaya, sultan Agung, Patih Jagul muda, Pangeran Kajoran, para sultan Yogyakarta, raja-raja Surakarta, raja-raja Mangkunegaran, para sultan Cirebon, pujangga Yosodipura, pangeran Diponegoro, Filosof Ronggowarsito. Karya-karya besar di bidang hukum seperti, Angger Surya Ngalam (KUHP Demak), Jagul Muda (KUHP Pajang), Angger Pradata Dalam dan Angger Arubiru (KUHP Mataram). Di samping itu, lahir pula karya-karya besar di bidang pemerintahan seperti, Serat Nitip raja, Serat nitisruti, Serat Tripama, Serat Wulangreh, bahkan karya-karya filsafat dan metafisika seperti, Sastra Gending, Serat Jatimurti, Suluk Wujil, Wirit Hidayat Jati, Serat Kalatidha (Sunyoto, 2006: 3-4). Semua nama yang termaktub merupakan hasil lulusan yang berkualitas semenjak ke-bangkitan kesultanan Demak saat itu (Arifin, 1993: 81).

Sesungguhnya siapa yang pertama kali memproklamirkan secara legal-formal "pendirian pesantren" itu? Sebagaimana ahli sejarah telah menjelaskan bahwa ternyata ada perbedaan (*khilafiyah*) tentang "pendirian pesantren" di kalangan pelaku sejarah. *Pertama*, pendiri pertama pesantren di Jawa adalah Syaikh Maulana Malik Ibrahim, yang dikenal dengan sebutan Syaikh Maghribi dari Gujarat India. *Kedua*, menurut Muh. Said dan Janimar Affan bahwa pesantren didirikan pertama oleh mbah Sunan Ampel (Raden Rahmat) di Kembang Kuning Surabaya Jawa Timur. *Ketiga*, menurut KH. Mahrus Aly bahwa di samping mbah Sunan Ampel pendiri pertama pesantren, ada pula yang beranggapan Sunan Gunung Jati di Cirebon sebagai pendiri pesantren pertama (Qomar, 2005: 8-9). Polarisai pendapat di atas, sangat memungkinkan bahwa Syaikh maghribi merupakan peletak dasar dan sendi-sendi pertama pesantren, sedangkan mbah Sunan Ampel sebagai penerus yang mengimplementasikan pembinaan pertama di Jawa Timur,

sementara Sunan Gunung Jati meneruskan jejak langkah senior sebelumnya yang juga mendirikan pesantren di Jawa Barat.

## 2. Pesantren; Madrasah dan Perkembangannya

Pendidikan di era Majapahit masih memiliki sistem pendidikan (*madrasah*) yang sangat sederhana dan tradisional apa adanya. Namun lebih menarik lagi, ketika era Mataram “pesantren” sudah menjadi lembaga pendidikan yang formal. Pola tatanan atau sistem pengembangannya sudah terdapat klasifikasi yang sudah dianggap mapan dan dapat digambarkan sebagai berikut: 1) tingkatan rendah, terdapat pengkajian al-Quran bagi anak-anak, 2) tingkatan menengah, pengkajian kitab-kitab (*al-Kutb al-Turats*) bagi pemuda-pemuda desa, 3) tingkatan *takhasus*, adalah pesantren keahlian, 4) tingkatan *thariqat*, pendidikan tinggi yang disediakan untuk santri-santri senior yang sudah matang (Jauhari, 2002: 11).

Konstruksi semangat pengembangan pesantren yang memiliki misi pendidikan, da'wah, dan keagamaan ternyata mampu menyedot perhatian masyarakat. Karena itu, pesantren berupaya mencerdaskan, meningkatkan kedamaian, dan membantu *sosio-psikis* mereka. Jadi, tidak mengherankan jika kemudian pesantren menjadi kebanggaan masyarakat sekitarnya, terutama bagi mereka yang menjadi muslim. Begitu pula, tidak mengherankan jika bagi Belanda “pesantren” merupakan antitesis terhadap gerak kresnitanisasi dan upaya pembodohan rakyat.

Dari sedikit paparan di atas, dapat kiranya kita menganalisa bahwa madrasah yang berkembang di lingkungan pesantren, masuk cikal bakal dalam kategori jenjang-jenjang sebagaimana berikut; MI (Madrasah Ibtidaiyyah), MTS (Madrasah Tsanawiyah), MA (Madrasah Aliyah) atau bahkan PTI (Pendidikan Tinggi Islam).

## 3. Madrasah: Menuju Pendidikan Islam Kontemporer

Dinamika perkembangan madrasah selanjutnya, dapat dikatakan sejalan dengan berdirinya organisasi-organisasi Islam di Indonesia sebagaimana halnya *Muhammadiyah* (1912 M) dengan Majelis Pendidikannya, *Nahdlatul Ulama* (1926 M) dengan Pendidikan Maarifnya, demikian juga *al-Irsyad*

(1913 M), *Jamiyyatul al-Washliyah* (1930 M) dan lain-lain (Hasan, 2006: 187).

Berawal dari gerakan berbagai organisasi besar itulah, proses perkembangan madrasah mengalami kemajuan yang sangat pesat. Muhammad Tholhah Hasan menjelaskan bahwa; madrasah tingkat dasar (MI), menengah pertama (MTs), menengah atas (MA), baik negeri maupun swasta mencapai 39.309 madrasah. Perkembangan madrasah dari periode tahun 1999-2000 sampai dengan tahun 2003-2004 meningkat dari 34.07 madrasah menjadi 39.309 madrasah, jadi setiap tahun meningkat sekitar 3%, dan jumlah tersebut belum termasuk madrasah-madrasah baru yang belum terdata, karena lokasinya banyak yang jauh di desa-desa yang sulit dijangkau (Hasan, 2006: 23).

Selanjutnya, upaya dalam meningkatkan pengembangan madrasah agar tidak tertinggal dengan non madrasah, telah mengacu pada 4 karakteristik yang dimiliki. *Pertama*, karakter Islami *kedua*, karakter populis *ketiga*, karakter keragaman *keempat*, karakter mandiri (Hasan, 2006: 190-191). Jadi, karakteristik madrasah itu merupakan daya tarik tersendiri untuk membedakan pendidikan dalam madrasah dengan yang lainnya.

#### **4. Sekilas Melihat Perguruan Tinggi Islam**

Menurut Azra bahwa Perguruan Tinggi Islam pertama adalah Sekolah Tinggi Islam yang didirikan di Jakarta tahun 1945 setelah Kemerdekaan RI. Pada tahun 1946 dipindahkan ke Jogjakarta dan dirubah dengan nama Universitas Islam Indonesia (UII) yang memiliki 4 fakultas; Agama, Pendidikan, Hukum, Ekonomi, dan selanjutnya dari fakultas Agama UII inilah muncul Perguruan Tinggi Agama Islam Negeri (PTAIN) berdasarkan peraturan pemerintah No 34 Tahun 1950 tertanggal 14 Agustus 1960 yang ditandatangani oleh Mr. Assaat selaku Pemangku Jabatan Presiden Republik Indonesia (Azra, 1998: 82).

Dari sisi lain, di Ciputat Jakarta telah didirikan Akademi Dinas Ilmu Agama (ADIA), yang merupakan sekolah dinas dengan tujuan mendidik dan mempersiapkan pegawai negeri untuk mencapai ijazah pendidikan semi-akademi dan akademi sehingga dapat menjadi ahli pendidikan agama



pada sekolah umum, kejuruan dan agama. Selanjutnya, PTAIN dan ADIA melebur dan berkembang pesat, melalui peraturan Presiden No 11 Tahun 1960 tertanggal 9 Mei 1960 menjadi IAIN yang bermarkas di Jogjakarta dan Jakarta. Pada tahun 1963 dijelaskan bahwa IAIN tersebut memiliki 4 fakultas: Tarbiyah, Adab, Ushuluddin dan Syariah, serta memiliki sejumlah fakultas di berbagai daerah lainnya. Pada perkembangan selanjutnya, cabang-cabang IAIN tersebut menjadi IAIN maupun STAIN yang berdiri sendiri-sendiri di sejumlah daerah. Sedangkan IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, merupakan IAIN pertama yang berubah menjadi Universitas Islam Negeri (UIN) di Indonesia pada tahun 2001 M. Kemudian mendapat rekomendasi dengan SKB Mendiknas RI No: 4/U/KB/2001 dan Menteri Agama No : 500/2001 tanggal 21 Nopember 2001. Kemudian resmi menjadi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, dengan terbitnya Keppres RI No. 31 Tahun 2002, tanggal 20 Mei 2002 ( Azra, 1998: 124-125). Selanjutnya UIN ini tidak hanya memiliki program dasar keilmuan agama semata, melainkan juga membuka program-Program Studi Ilmu-Ilmu Sosial dan Eksakta seperti: Agribisnis, Teknik Informatika, Manajemen, Akuntansi, Ekonomi, Psikologi, dan Kedokteran. Perkembangan berikutnya, UIN Syahid ini diikuti oleh berdirinya UIN yang lain seperti UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UIN Malang, UIN Makasar, UIN Pekanbaru, di samping membuka jenjang (SI), (S2), dan juga ada yang sudah membuka jenjang (S3).

Perjalanan perkembangan PTI yang dimaksud di atas, terjadi pada Perguruan Tinggi Islam yang berstatus negeri. Sementara Perguruan Tinggi Islam yang berstatus Swasta, ternyata ketika ditelusuri juga berangkat dari UII yang bermarkas di Yogyakarta. Pada tahun 1960-1970 M. UII mengalami perkembangan dan perluasan yang sangat pesat sedemikian rupa, sehingga membuka beberapa cabang di sejumlah daerah. Sesungguhnya UII inilah yang merupakan cikal bakal munculnya berbagai Universitas Islam di sejumlah daerah seperti: Universitas Yarsi di Jakarta, Universitas Ibnu Khaldun di Bogor, Universitas Bandung (UNISBA) di Bandung, Universitas Muhammadiyah Surakarta (UMS) di Surakarta, Universitas Islam Sultan Agung (UNISULA) di Semarang, Universitas Wahid Hasyim di Semarang, Universitas Islam Malang (UNISMA) di Malang, Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) di Malang, Universitas Islam Sunan Giri (UNSURI) di Surabaya,

Universitas Darul Ulum (Undar) di Jombang, Universitas Muslim Indonesia (UMI) di Makasar dan lain-lain (Hasan, 2006). Berbagai Perguruan Tinggi Islam tersebut, tidak hanya membuka studi agama Islam, namun demikian juga membuka studi ilmu-ilmu sosial, eksakta, dan kedokteran, di samping ada juga yang sudah membuka jenjang S-2 dan S-3.

### **Mencari Solusi Problematika Pendidikan Islam**

Bertolak dari kegelisahan terhadap pendidikan Islam kita, setidaknya kita dapat berpijak dalam mencarikan solusi alternatif yang terbaik sebagai berikut:

*Pertama*, menurut Azyumardi Azra bahwa gagasan pembaharuan pendidikan Islam di Indonesia setidaknya terdapat dua kecenderungan sebagai berikut: 1) Adalah Adopsi sistem dari lembaga pendidikan modern (Barat/Belanda) secara hampir menyeluruh. Titik tolak modernisme Islam di sini adalah sistem dan kelembagaan pendidikan modern (ala Barat/Belanda), bukan sistem dan lembaga pendidikan Islam tradisional. Hal ini juga pernah di implementasikan sekolah Adabiyahnya Abdullah Ahmad (1915), dan sekolah-sekolah yang diselenggarakan Muhammadiyah. 2) Adalah bertolak dari sistem dan lembaga pendidikan Islam yang sudah ada (seperti madrasah dan pesantren), kemudian dimodernisir dengan mengadopsi aspek-aspek tertentu, seperti aspek kurikulum, manajemen, metodologi dan system pembelajaran. Hal ini pernah dilakukan antara lain Pesantren Mambaul al-Ulum Surakarta (pada tahun 1906), Pesantren Tebu Ireng Jombang (pada tahun 1916) telah membuka sekolah-sekolah klasikal dan memasukkan kurikulum baru dalam sistem pendidikannya (Azra, 2002: 36-38).

*Kedua*, Umar as-Syaibany, seorang tokoh pendidikan dari Libya menyarankan di dalam memajukan pendidikan Islam sekarang, di samping menggunakan rujukan al-Quran maupun al-Sunnah, khazanah Islam, konsep-konsep serta pengalaman berharga dari pakar-pakar pendidikan Islam sepanjang sejarahnya, juga menggunakan atau memanfaatkan rujukan dan konsep serta pengalaman dan temuan-temuan kontemporer, yang dihasilkan melalui beberapa hal: a) penelitian-penelitian ilmiah, yang

dilakukan oleh pakar pendidikan, baik yang muslim maupun non muslim; b) pengalaman dan temuan empirik dari berbagai macam bangsa, yang muslim maupun non muslim; c) dari seminar dan dokumen-dokumen yang dihasilkan melalui pertemuan-pertemuan internasional tentang pendidikan, dengan catatan setelah semua itu dikaji dengan cermat dan cerdas, mana yang cocok dengan kebutuhan pendidikan Islam di tiap-tiap daerah, dan sesuai dengan tradisi dan budayanya masing-masing, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip ajaran dan nilai-nilai dasar Islam yang dipegangnya (Syaibany: 1985: 101-103).

*Ketiga*, Pengembangan pendidikan Islam ke depan secara realistis harus disinkronisasikan dengan kebijakan nasional guna membebaskan bangsa dari himpitan berbagai persoalan. Sedangkan berbagai prinsip strategis pengembangan dapat diuraikan antara lain: *pertama*, orientasi pengembangan sumber daya; *kedua*, ke arah pendidikan Islam multikulturalis; *ketiga*, mempertegas misi dasar “*Li Utammima Makarima al-Akhlaq*” *keempat*, spiritualisasi watak kebangsaan fondasi dari bangunan kebangsaan itu menurut prespektif Islam adalah iman (Fajar, 2004: 50).

*Keempat*, Muhammad Tholhah Hasan, menandaskan pula bahwa perkembangan dan kemajuan Perguruan Tinggi di Indonesia sampai saat ini (tahun 2006 M) banyak ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut: (1) Kredibilitas kepemimpinan (2) Kreativitas managerial kelembagaan (3) Pengembangan program akademik yang jelas (4) Kualitas dosen yang memiliki tradisi akademik (Hasan, 2006: 202-203).

Dari berbagai uraian para pakar dan ilmuan di atas, memiliki kontribusi yang sangat berharga terhadap pemecahan problematika pendidikan Islam di Indonesia dewasa ini. Berbagai solusi terbaik yang dikemukakan tersebut tidak hanya terbatas dalam Pesantren, madrasah (MI), (MTs), (MA), atau bahkan Pendidikan Tinggi Islam (PTI) kita, melainkan juga jawaban atas problematika bangsa dan negara.

## **Simpulan**

Berbagai uraian yang telah dikemukakan di atas, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Pesantren merupakan akar historis pendidikan Islam di Indonesia, meskipun belum dikatakan pendidikan secara legal-formal pada awal berdirinya. Namun demikian, dinamika perkembangan pendidikan pesantren mendapatkan sambutan yang luar biasa di tengah masyarakat luas. Hal ini terjadi pada masa Majapahit.
2. Pada era Mataram pendidikan pesantren mulai merangkak ke formalitas sudah ada berbagai jenjang pendidikan yang dikembangkan. Ketika lahir organisasi-organisasi sosial keagamaan, pendidikan dan dawah sebagaimana Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama (NU), al-Irsyad, Jamiyyatul al-Washliyah dan lain-lain, pendidikan Islam kita mulai berkembang pesat dan pola pengembangannya ke arah modern dan kontemporer. Lebih-lebih Pendidikan Tinggi Islam kita dari Sekolah Tinggi Islam sampai Universitas Islam Negeri (UIN) atau mulai dari Universitas Islam Indonesia (UII) sampai muncul nama-nama Universitas-Universitas Islam Swasta terkenal seperti: Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Universitas Darul Ulum (UNDAR) Jombang dan lain-lain.
3. Solusi terbaik dalam kondisi riil pendidikan Islam kita sebagaimana yang telah dikemukakan oleh pakar dan cendekiawan muslim seperti: Azyumardi Azra, As-Syaibany, A. Malik Fajar dan Muhammad Tholhah Hasan.

### Daftar Pustaka

- Azra, Azyumardi. 1998. *Isei-isei Intelektual Muslim dan Pendidikan Islam*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Azra, Azyumardi. 2002. *Pendidikan Islam, Tradisi dan Modernisasi Menuju Millenium Baru*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Al-Akhdhari, Muhammad, Ibn Abdurahman. Tt. *Taqrirat al-Jauhar al-Maknun*. Kediri: MHM.
- As-Syaibany, Umar Muhammad at-Taumy. 1985. *Al-Fikr al-Tarbiyy bain an-Nadhariyah wa at-Tathbiq*. Tripili Libya: Al-Mansyaah al-Ammah li an-Nasyr wa at-Tawzi wa al-Ilan.

- Al-Hijazy, Hasan Ali, Ibn Hasan. 2001. *Al-Fikr al-Tarbiyah Inda Ibn Qo'ayyim*. Terj. Muzaidi Hasbullah. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Arifin, Imron. 1993. *Kepemimpinan Kyai: Kasus Pondok Pesantren Tebuiring*. Tp.: Kalimasahada Press.
- Fajar, Malik. A. 2004. Strategi Pengembangan Pendidikan Islam Dalam Era Globalisasi. Dalam *Horizon Baru Pengembangan Pendidikan Islam*. Yogyakarta: Penerbit Aditya Media Yogyakarta bekerjasama dengan UIN Press Malang.
- Jauhari, Idris. 2002. *Sitem Pendidikan Pesantren*. Madura: Mutiara.
- Jalal, Fasli dan Dedi Supriadi. 2001. *Reformasi Pendidikan Dalam Konteks Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Adi Cipta Karya Nusa.
- Mastuhu. 1994. *Dinamika Sistem Pesantren*. Jakarta: INIS
- Qomar, Muzamil. 2005. *Pesantren dari Transformasi Metodologi Menuju Demokratisasi Institusi*. Jakarta: Erlangga.
- Sunyoto, Agus. 2006. "Pasang Surut Pesantren Dalam Srejarah". Nganjuk: Makalah Workshop "Pesantren Global".
- Tim Panitia, 2006. Proposal: Workshop *Pesantren Global* Nganjuk: PP. AL-Arfiyyah.
- Hasan, Muhammad Tholhah. 2006. *Dinamika Pemikiran Tentan Pendidikan Islam*. Jakarta: Lantobora Press.
- Yunus, M.. 1983. *Sejarah Pendidikan Islam*. Jakarta: Hidakarya.